

Pelatihan Komunikasi Aparat Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa

Ari Sulistyanto¹, Tabrani Syahrizal^{2*}, Yudhistira Ardi Poetra³, Pagi Muhamad⁴, Dinar Sulistyowati⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

Email: ¹ari.Sulistyanto@dsn.ubharajaya.ac.id, ²tabrani.sjahrizal@dsn.ubharajaya.ac.id,

³yudhistira.ardipoetra@dsn.ubharajaya.ac.id, ⁴pagi.muhamad@dsn.ubharajaya.ac.id,

⁵dinar.sulistyowati@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Communication is a strategic element in supporting the effectiveness of participatory and accountable village governance. However, several issues remain, including the low interpersonal communication skills of village officials, weak internal coordination, and the suboptimal use of digital communication technologies. Therefore, this activity aims to enhance the communication competencies of village apparatus through systematically and applicatively designed training. The methods employed include lectures, discussions, and practical simulations of governmental communication. The training materials cover understanding public service communication at the village level, interpersonal communication and internal coordination, the use of village communication media (e.g., WhatsApp, village websites, social media), public message formulation and information management, and simulations of public service communication with citizens. Participants consisted of village heads, secretaries, hamlet heads, neighborhood leaders (RT/RW), and public service staff. Evaluation results show a significant improvement in participants' communication understanding and skills, with an average increase from 48.2% before training to 81.4% after training. Village officials became more skilled in delivering information, utilizing digital media, and engaging in empathetic and effective communication with the community. These findings affirm that enhancing communication capacity is a key component in building responsive, transparent, and participatory village governance, in line with good governance principles in local development. Furthermore, the training encouraged officials to become more adaptive in conveying information efficiently and promptly.

Keywords: Village Communication, Village Officials, Communication Training, Public Service, Digital Governance, Village Administration.

Abstrak

Komunikasi merupakan elemen strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Namun, berbagai persoalan masih ditemukan, antara lain rendahnya keterampilan komunikasi interpersonal aparatur, lemahnya koordinasi internal, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Oleh, karena itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi aparatur desa melalui pelatihan yang dirancang secara sistematis dan aplikatif. Metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, dan simulasi praktik komunikasi pemerintahan. Sedangkan materi pelatihan adalah pemahaman komunikasi pelayanan publik desa, komunikasi interpersonal dan koordinasi internal, penggunaan media komunikasi desa (WA, website desa, media sosial), penyusunan pesan publik dan manajemen informasi desa, dan simulasi pelayanan publik dan komunikasi dengan masyarakat. Sedangkan peserta terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT/RW, dan staf pelayanan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan komunikasi peserta, dengan peningkatan rata-rata dari 48,2% sebelum pelatihan menjadi 81,4% setelah pelatihan. Aparatur desa menjadi lebih terampil dalam menyampaikan informasi, menggunakan media digital, dan membangun komunikasi yang empatik dan efektif dengan masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi merupakan komponen kunci dalam membangun pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan partisipatif, selaras dengan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan lokal. Selain itu, pelatihan ini mendorong aparatur desa lebih adaptif dalam menyampaikan informasi secara efektif dan cepat.

Kata Kunci: Komunikasi Desa, Aparatur Desa, Pelatihan Komunikasi, Pelayanan Publik, Digitalisasi Pemerintahan, Tata Kelola Desa.

A. PENDAHULUAN

Komunikasi adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif (Dwinarko, et al, 2021). Melalui komunikasi yang berkualitas, aparatur desa dapat menjalankan kebijakan desa secara terukur dan terarah(Willudjeng et al., 2024). Di samping itu, aparatur desa juga dapat menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan komunikasi di tingkat desa yang menghambat jalannya pemerintahan. Aparatur desa kerap kali menghadapi kendala dalam menyampaikan informasi secara jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini diperparah dengan belum meratanya kemampuan komunikasi interpersonal di kalangan perangkat desa, sehingga menimbulkan jarak antara pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, kegiatan musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif justru berlangsung pasif karena masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan agenda yang disampaikan oleh aparatur desa. Aparatur pemerintah desa kerap kali menggunakan istilah teknis atau bahasa formal yang tidak kontekstual(E. N. Dewi, 2021). Selain itu, komunikasi internal antar aparatur desa pun sering kali tidak berjalan dengan baik. Keadaan ini menyebabkan koordinasi menjadi lemah dan terjadi tumpang tindih pelaksanaan program(Sulistyanto et al., 2022). Misalnya, dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, ketidaksinkronan antara kepala seksi pembangunan dengan kepala dusun dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek karena informasi teknis tidak tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas birokrasi desa, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus diberikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada aparatur desa agar mampu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial di lingkungannya(Sulistyanto & Mujab, 2022).

Contoh lain kasus permasalahan komunikasi aparatur desa dan masyarakat, seperti pada kasus perselisihan warga dengan perangkat Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Penyebab perselisihan karena adaanya kesalahan pahaman antara kedua belah pihak (Nasrullah, 2023). Kasus lain, perselisihan antara warga dengan aparatur desa Hanau Brak, Lampung. Kejadian diawali dengan ketegangan antara warga dengan aparatur desa dalam mengurus surat Numpang Nikah (NA)(Asen, 2024).

Situasi tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas sebagian aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Banyak perangkat desa yang masih mengandalkan pola komunikasi tradisional, seperti penyampaian informasi secara lisan atau melalui kelompok-kelompok kecil masyarakat.(Sulistyanto et al., 2020) Akibatnya, pesan tidak tersampaikan secara merata, sering terjadi distorsi informasi, dan masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai berbagai program desa. Misalnya, dalam beberapa kasus distribusi informasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), terjadi perbedaan pemahaman antara aparatur desa dan warga, yang kemudian memicu ketegangan sosial karena komunikasi yang tidak efektif(Sariet al., 2025).

Contoh lainnya dapat dilihat pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Banyak warga menyatakan tidak memahami mekanisme musyawarah desa, jadwal kegiatan, maupun hasil musrenbang desa karena informasi yang disampaikan aparatur tidak terstruktur dan tidak menggunakan saluran komunikasi yang memadai(Samaun et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi, baik pada tataran interpersonal, kelembagaan, maupun penggunaan media digital.

Sebelumnya, hasil kegiatan pengabdian masyarakat tentang komunikasi dan aparatur desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan mengenai analisis syarat komunikasi bagi aparatur Desa terhadap Pelayanan publik. Hasilnya, komunikasi pelayanan publik dalam mengelola administrasi Desa belum terlaksana dengan baik(Farid, 2020; Ferida et al., 2024; Putra et al.,2025). Begitu pula, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai analisis kualitas komunikasi aparatur Desa. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya kualitas yang baik dari sisi aparatur maupun masyarakat. Aparatur desa lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi dan merespons dengan empati, sementara warga semakin berani menyampaikan pendapat secara langsung(Dewi et al.,2025). Kesimpulan dari hasil pengabdian yang sudah dilakukan sebelumnya lebih fokus pada analisis dan kualitas komunikasi publik yang dilakukan aparatur Desa. Sedangkan, kegiatan dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, memperkuat koordinasi internal, serta mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi modern belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, Desa sebagai institusi pemerintahan terdepan membutuhkan aparatur dengan kompetensi komunikasi yang baik agar proses pelayanan publik berjalan efektif(Dwinarko et al., 2021). Komunikasi pemerintahan desa mencakup kemampuan menyampaikan informasi publik, membangun hubungan dengan masyarakat, mengelola konflik, serta memfasilitasi partisipasi warga(Ulla, 2019). Aparatur desa harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu, sekaligus dapat berinteraksi secara empatik dengan warga yang memiliki latar belakang sosial dan tingkat literasi berbeda.

Dalam perspektif *Coordinated Management of Meaning (CMM) Theory* memandang individu dan masyarakat bukan sebagai hal yang berada di luar komunikasi, tetapi sebagai pencapaian yang dibentuk melalui praktik komunikatif(Miller & Davidson, 2019). Selanjutnya, teori ini menjelaskan, dan memfasilitasi pengembangan bentuk komunikasi baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masyarakat kontemporer(Yim, 2022). Teori ini relevan untuk melihat komunikasi yang dilakukan aparatur desa dalam pelayanan publik. Masyarakat bukan sebagai entitas diluar kelembagaan desa, melainkan suatu bagian yang integral. Oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas komunikasi yang terpenting adalah pemahaman bersama.

Untuk memetakan persoalan komunikasi tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Berdasarkan pengamatan awal di beberapa desa, terdapat beberapa permasalahan utama: *Pertama*, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam komunikasi pelayanan publik. Banyak aparat tidak memahami prinsip komunikasi efektif, termasuk cara menyusun pesan yang informatif dan mudah dipahami. *Kedua*, belum optimalnya pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti WhatsApp group warga, website desa, atau papan informasi digital, sehingga distribusi informasi masih terbatas. *Ketiga*, koordinasi internal antarperangkat desa sering tidak berjalan lancar karena pola komunikasi yang tidak terstandar, sehingga berpengaruh pada kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya keterampilan teknis, tetapi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kegiatan penguatan komunikasi aparatur desa ini bertujuan:

- a) meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyampaikan informasi publik secara efektif dan transparan;
- b) memperkuat komunikasi interpersonal dan koordinasi internal pemerintah desa;
- c) meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi komunikasi modern; dan
- d) mendorong terbentuknya pola komunikasi pemerintahan desa yang lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel.

Manfaat yang diharapkan melalui pelatihan ini dapat dilihat pada tiga kelompok utama. Untuk aparat desa, pelatihan akan meningkatkan kompetensi komunikasi mereka yang pada gilirannya mendukung profesionalisme, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat koordinasi internal. Untuk institusi pemerintahan desa secara keseluruhan, munculnya pola komunikasi yang lebih baik akan memperkuat sistem kerja antar perangkat, mempercepat proses penyampaian informasi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Untuk masyarakat, manfaatnya adalah terbukanya ruang dialog yang lebih luas dan efektif. Artinya aspirasi warga dapat terserap dengan lebih baik dan warga merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan desa, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Upaya meningkatkan kualitas komunikasi aparatur desa dilakukan melalui pendekatan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan praktik komunikasi dalam konteks pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. Pelatihan diikuti oleh aparatur desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT/RW, serta staf pelayanan masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan tiga strategi utama, yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi praktik komunikasi pemerintahan. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan disusun dalam empat sesi pembelajaran. Pada sesi pertama, dilakukan penggalian pemahaman mengenai permasalahan komunikasi yang sering muncul dalam pelayanan publik desa—misalnya miskomunikasi penyampaian informasi bantuan sosial, koordinasi internal yang tidak tersampaikan, atau pelayanan administrasi yang tidak informatif.

Sesi kedua dilakukan melalui ceramah dan diskusi mengenai konsep dasar komunikasi efektif, komunikasi pelayanan publik, dan komunikasi digital pemerintahan desa. Sesi ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis mengenai pentingnya kejelasan pesan, ketepatan saluran komunikasi, dan teknik berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki karakter sosial beragam.

Pada sesi ketiga dilakukan simulasi yang menekankan pada praktik penyusunan pesan informasi publik, latihan menyampaikan pengumuman layanan, dan simulasi penyelesaian konflik melalui komunikasi interpersonal. Peserta juga berlatih menggunakan media komunikasi desa seperti WhatsApp grup warga, papan informasi digital, dan kanal media sosial desa sebagai sarana penyebaran informasi secara efektif.

Sesi keempat merupakan evaluasi pemahaman peserta dengan memberikan instrumen pengukuran sederhana. Evaluasi dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan komunikasi aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan.

Tabel 1. Materi Pelatihan dan Indikator Ketercapaian		
No	Materi Pelatihan	Indikator Ketercapaian
1	Pemahaman Komunikasi Pelayanan Publik Desa	1. Peserta mampu menjelaskan prinsip komunikasi efektif. 2. Peserta memahami prosedur penyampaian informasi layanan publik.
2	Komunikasi Interpersonal dan Koordinasi Internal	1. Peserta mampu melakukan komunikasi antarpersonal di desa secara jelas dan terbuka. 2. Peserta mampu mengidentifikasi hambatan komunikasi internal.
3	Penggunaan Media Komunikasi Desa (WA, website desa, media sosial)	1. Peserta mampu mengoperasikan media informasi desa. 2. Peserta mampu menyusun dan mengunggah pesan layanan publik secara efektif.
4	Penyusunan Pesan Publik dan Manajemen Informasi Desa	1. Peserta mampu menyusun pengumuman, edaran, dan instruksi yang mudah dipahami. 2. Peserta mampu mengelola informasi desa secara transparan dan akuntabel.
5	Simulasi Pelayanan Publik dan Komunikasi dengan Masyarakat	1. Peserta mampu memberikan penjelasan layanan secara jelas kepada warga. 2. Peserta mampu merespons pertanyaan dan keluhan warga secara profesional.

Sumber: Olahan Peneliti

Metode pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan aspek kognitif peserta tetapi juga melatih keterampilan praktis agar dapat diterapkan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pola komunikasi aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan responsif.

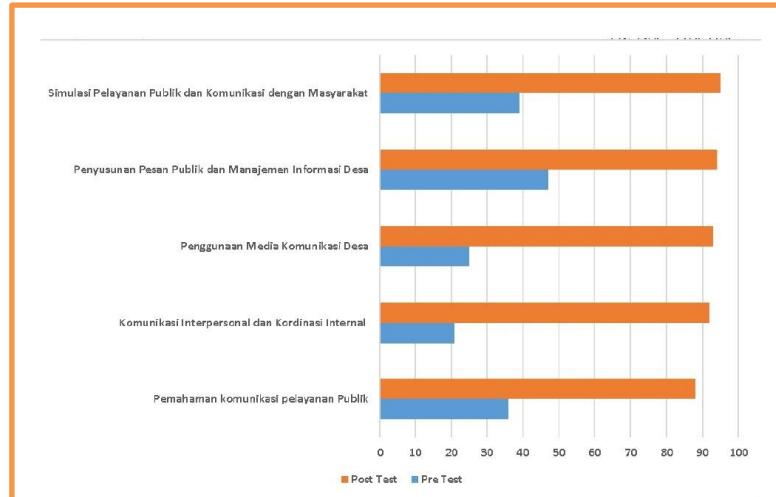
Peserta pelatihan sebanyak 30 peserta yang terdiri dari aparatur Desa Pantai Bahagia, ditambah dengan perangkat Ketua RW maupun Ketua RT. Sebelum kegiatan pelatihan di mulai dilakukan *Pre Test* dengan menyebarkan kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal mengenai komunikasi masyarakat. Kemudian pada akhir sesi, dilakukan *Post Test* sebagai bagian dari evaluasi menyeleluru untuk mengetahui pemahaman akhir peserta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektivitas pelatihan komunikasi aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan, dilakukan pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Pengukuran ini mencakup aspek komunikasi pelayanan publik, komunikasi interpersonal, koordinasi internal, dan penggunaan media komunikasi digital desa. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki pemahaman komunikasi pada kategori rendah hingga sedang. Dalam gambar 2 pada pemahaman awal untuk pemahaman komunikasi pelayanan publik desa sebesar 36%, komunikasi interpersonal dan koordinasi internal sebesar 21 %, penggunaan media komunikasi desa (wa, website desa, media sosial) sebesar 25%, penyusunan pesan publik dan manajemen informasi desa sebesar 47 %, dan simulasi pelayanan publik dan komunikasi dengan masyarakat sebesar 39%.

Setelah pelatihan dilakukan, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan komunikasi peserta. Dari hasil evaluasi akhir, pemahaman komunikasi pelayanan publik desa sebesar 88%, komunikasi interpersonal dan koordinasi internal sebesar 92 %, penggunaan media komunikasi desa (wa, website desa, media sosial) sebesar 93%, penyusunan pesan publik dan manajemen informasi desa sebesar 94 %, dan simulasi pelayanan publik dan komunikasi dengan masyarakat sebesar 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa

metode pelatihan berbasis ceramah, diskusi, dan simulasi sangat membantu dalam meningkatkan kompetensi komunikasi aparatur desa. Pola pendekatan pelatihan interaktif tersebut mampu memberikan hasil yang signifikan dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan praktis.



Gambar 1. Hasil Pre Test Ddan Post Test Pelatihan Komunikaasi Aparatur Pemerintah Desa

Simulasi penyampaian informasi publik secara langsung juga memperlihatkan perubahan perilaku komunikasi. Peserta yang sebelumnya cenderung membaca teks secara kaku mulai mampu berkomunikasi dengan intonasi, bahasa tubuh, dan pilihan kata yang lebih sesuai konteks. Dalam simulasi pelayanan administrasi kependudukan, sebagian peserta mampu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada warga mengenai alur pelayanan, waktu tunggu, dan dokumen yang dibutuhkan. Situasi ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek clarity dan empathy, yang merupakan elemen penting dalam komunikasi pelayanan publik.

Selain itu, pelatihan penggunaan media komunikasi digital desa memberikan pemahaman baru bagi aparatur tentang pentingnya penyebarluasan informasi melalui saluran modern. Banyak peserta yang sebelumnya tidak familiar dengan penggunaan sistem informasi desa, website desa, maupun WhatsApp broadcast. Setelah simulasi dilakukan, peserta mampu mengunggah pengumuman desa, menyusun infografis sederhana, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih cepat dan terjangkau. Temuan ini menguatkan bahwa digitalisasi komunikasi desa merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kemampuan komunikasi aparatur desa memiliki implikasi penting. Aparatur desa menjadi lebih siap dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan, menyampaikan informasi pembangunan secara akurat, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam prinsip *governance modern*.



Gambar 2. Ceramah Pemberian Materi

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan komunikasi bagi aparatur desa, ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan komunikasi peserta, yang secara langsung mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Evaluasi sebelum pelatihan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap berbagai aspek komunikasi masih tergolong rendah hingga sedang, khususnya dalam komunikasi pelayanan publik, komunikasi interpersonal, koordinasi internal, dan penggunaan media komunikasi digital desa(Septiansyah et al., 2023). Setelah pelatihan berbasis ceramah, diskusi, dan simulasi diterapkan, terjadi peningkatan pemahaman yang substansial di seluruh aspek yang diukur. Metode pelatihan interaktif ini terbukti efektif tidak hanya dalam aspek teoritis, tetapi juga dalam penerapan praktis di lapangan. Simulasi pelayanan publik memperlihatkan perbaikan perilaku komunikasi, ditandai dengan peningkatan kejelasan (*clarity*) dan empati (*empathy*) dalam penyampaian informasi kepada masyarakat(Bantun et al., 2021).

Temuan penting dari kegiatan keterampilan komunikasi aparatur Desa Pantai Bahagia ini sejalan dengan kegiatan penguatan kapasitas aparat desa melalui keterampilan komunikasi di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunikasi aparat desa, yang tercermin dari kemampuan mereka menyampaikan informasi lebih jelas, mendengarkan lebih baik, dan membangun hubungan lebih baik dengan masyarakat desa. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman aparat desa tentang pentingnya komunikasi efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam melayani masyarakat secara lebih efektif(Ladjaiya et al., 2024). Hal yang sama juga terjadi di Desa Mansalean. Komunikasi interpersonal yang dibangun oleh aparat desa, baik secara formal maupun informal, memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan, partisipasi dalam pembangunan desa, serta kepercayaan terhadap pemerintahan desa(Putra et al., 2025).

Selain itu, pelatihan penggunaan media komunikasi digital turut membekali aparatur desa dengan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan modern, seperti pengelolaan website desa, pemanfaatan WhatsApp broadcast, serta penyusunan konten infografis sederhana(Sulistyanto et al., 2022). Perubahan ini memperlihatkan pentingnya digitalisasi dalam komunikasi desa sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik(Mardiyani et al.,2020). Dengan meningkatnya kemampuan komunikasi ini, aparatur desa menjadi lebih mampu menyampaikan informasi pembangunan secara akurat dan menjalin hubungan yang konstruktif dengan masyarakat(Purba, 2023). Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas komunikasi merupakan elemen kunci dalam mendukung terciptanya pemerintahan desa yang responsif, akuntabel, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dalam konteks pembangunan lokal(Mamonto et al., 2022).

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pelatihan komunikasi aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman aparatur desa mengenai prinsip komunikasi efektif, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan penyampaian informasi desa. Pelatihan meningkatkan pemahaman peserta dari rata-rata 48,2% menjadi 81,4%.
2. Kemampuan komunikasi interpersonal dan koordinasi internal aparatur desa mengalami penguatan, terutama dalam penyampaian informasi secara jelas, penyusunan pesan publik, dan respons terhadap pertanyaan maupun keluhan masyarakat.
3. Peserta mampu memanfaatkan berbagai media komunikasi desa, termasuk WhatsApp broadcast, papan informasi digital, dan media sosial desa sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih cepat, luas, dan terstruktur.
4. Simulasi pelayanan publik terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan praktik aparatur desa, terutama dalam memberikan penjelasan layanan yang ramah, empatik, dan mudah dipahami oleh warga.

Saran

Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas komunikasi aparatur desa sehingga lebih siap menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Untuk keberlanjutan program, disarankan adanya pendampingan lanjutan guna memastikan praktik komunikasi baik yang telah dipelajari dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan pemerintahan desa.

Ucapan Terima Kasih

Mengucapkan pada LPPM Universitas Bhayangkara Jakarta dalam memberikan suport terhadap kegiatan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asen. (2024). Perselisihan Warga Dan Aparat Desa Hanau Brak Berakhir Damai. Retrieved from Patra Indonesia.Com website: <https://patraindonesia.com/perselisihan-warga-dan-aparat-desa-hanau-brak-berakhir-damai/>
- Bantun, S., Sari, J. Y., Z, N., Syahrul, S., & Budiman, A. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik Desa Palewai Dengan Sistem Informasi Desa. *INFORMAL: Informatics Journal*, 6(3), 160. <https://doi.org/10.19184/isj.v6i3.25185>
- Dewi, E. N. (2021). KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT - PROVINSI BANTEN. *Media Nusantara*, 18 No. 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/medinus.v18i2.1260>
- Dewi, Y. F., Suryani, L., Evan Haviana, & Asri, Y. N. (2025). Penguatan Komunikasi Publik Aparatur Desa Jambudipa. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 362–369. Retrieved from <https://doi.org/10.59066/jppm.v4i3.1689>
- Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4 SE-Articles). <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Farid, A. S. (2020). Strategi Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik di Level Pemerintahan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 813–820. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.153>
- Ferida Asih Willudjeng, Maharani, W. M., & Guntarayana, I. (2024). KOMUNIKASI APARATUR DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA SE-KECAMATAN KESAMBEN BLITAR. *Jurnal Media Akademik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.135>
- Ladjaiya, U. E. J., Misriah, M., Santi, S., Waspada, M. R. I., Kurniawan, K., & Zaman, W. (2024). PENGUATAN KAPASITAS APARAT DESA MELALUI KETERAMPILAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DI DESA BUNGA KECAMATAN L UWUK UTARA. KARYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). Retrieved from 101–105.
- Mamonto, S. I. P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu). *JURNAL GOVERNANCE*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/41384>
- Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., & Cahyati, R. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 188–192. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6533>
- Miller, Ashley, & Davidson, Sarah. (2019). Co-ordinating meaning within a gender identity development service: What can the theory of the co-ordinated management of meaning offer clinicians working with young people, and their families, exploring their gender identities. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 24(2), 322–337. <https://doi.org/10.1177/1359104519838313>
- Nasrullah. (2023). Polisi Tangani Perselisihan Warga dengan Perangkat Desa. Retrieved from RRI.Co.Id website: [https://rri.co.id/daerah/222101/polisi-tangani-perselisihan-warga-dengan-perangkat-desa#:~:text=KBRN%2C Lhokseumawe: Tim Unit Reaksi Cepat \(URC\),Lhokseumawe%2C AKBP Henki Ismanto%2C SIK melalui Kasat](https://rri.co.id/daerah/222101/polisi-tangani-perselisihan-warga-dengan-perangkat-desa#:~:text=KBRN%2C Lhokseumawe: Tim Unit Reaksi Cepat (URC),Lhokseumawe%2C AKBP Henki Ismanto%2C SIK melalui Kasat)
- Purba, H. S. (2023). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik Di Kota Tanjungbalai. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 7(1).

- Putra, I. R., Falimu, & Kede, A. (2025). KOMUNIKASI APARAT DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI DESA MANSALEAN. *Babasal Communication Science*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/10.32529/1.v3i1.4343>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Sari, D. N., Apriyani, T., & Manik, R. R. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Tahun 2024 Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di kalurahan Keprek Kapanewon SaptoSari Kabupaten Gunungkidul. *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, 2(3), 91-100. Retrieved from <https://isn-jurnal.my.id/index.php/jurist/article/view/42>
- Septiansyah, B., Wulandari, W., Gunawan, W., & Rochaeni, A. (2023). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Desa Di Era Digital 4.0 (Studi Kasus Pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1734>
- Sulistyanto, A., Dwinarko, Muhamad, P., Sjahrizal, T., Jamil, A., & Haris, A. (2020). Pelatihan Masyarakat dalam Komunikasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Desa Ponggang, Kec. Serangpanjang, Kab. Subang. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 149–156. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102112>
- Sulistyanto, A., Muhamad, P., & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasiskan Website. *AJurnal Bdidas*, 2, 117–128.
- Sulistyanto, A., & Mujab, S. (2022). Pelatihan Manajemen Komunikasi Pemasaran Bagi Usaha Menengah Kecil Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, ABDIKAN, 1(1), 10–18.
- Ulla, D. R. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Opinion Leader Di Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. repository.uin-suska.ac.id. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/21918/>
- Willudjeng, F. A., Maharani, M. W., & Guntarayana, I. (2024). Komunikasi Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Se-Kecamatan Kesamben Blitar. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i1.135>
- Yim, S. H. (2022). A Critique of Coordinated Management of Meaning and Circularity in Relation to Countering Oppressive Practice: Reflections from a Trainee Therapist. *Australian & New Zealand Journal Family of Therapy*, 33(3). Retrieved from <https://doi.org/10.1002/anzf.1506>